

Penerapan *Open Government* Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Publik di Kota Denpasar (Kajian Denpasar Open Data)

Komang Adi Sastra Wijaya*, Juwita Pratiwi Lukman,
Sang Ayu Nyoman Sinta Dewi, Ni Wayan Riani
Universitas Udayana, Badung, Indonesia
*sastra_wijaya@unud.ac.id

Abstract

The open government concept has been implemented in Denpasar City based on Denpasar Mayor Regulation Number 28 of 2011 concerning Guidelines for Management of Information and Documentation Services in the Denpasar City Environment. One of them is through the Denpasar Open Data website which supports easy access to information for the public regarding the city of Denpasar. The application of the open government concept in Denpasar City in monitoring and evaluating government openness instruments is considered inadequate so it must be considered optimally. Apart from that, there is invalidity of data sources, thereby reducing public trust. The aim of this research is to analyze the application of open government in improving public services in Denpasar City based on the Denpasar Open Data study. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Research data analysis using Miles and Huberman consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of open government in Denpasar City has gone well, but there are several obstacles found on the main website in facilitating public participation. There are several platforms that do not provide public access to data so they need to be optimized by the Denpasar City Communications, Information and Statistics Department to meet the needs of the community.

Keywords: *Open Government; Transparation; Information*

Abstrak

Konsep pemerintah terbuka (*open government*) telah diterapkan di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kota Denpasar. Salah satunya melalui website Denpasar Open Data yang mendukung kemudahan penyelenggaraan akses informasi untuk publik mengenai kota Denpasar. Penerapan konsep *open government* di Kota Denpasar pada instrumen *monitoring* dan evaluasi keterbukaan pemerintah dinilai kurang sehingga harus dipertimbangkan secara optimal. Selain itu terjadi ketidakabsahan terhadap sumber data sehingga menurunkan kepercayaan publik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan *open government* dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Denpasar berdasarkan kajian Denpasar Open Data. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan *open government* di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat beberapa kendala yang ditemukan pada website utamanya dalam mewadahi partisipasi publik. Terdapat beberapa *platform* yang tidak memberikan akses

kepada publik dalam mengakses data sehingga perlu dioptimalkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Kota Denpasar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintahan Terbuka; Transparansi; Informasi

Pendahuluan

Transparansi informasi publik menjadi gerakan populer di seluruh dunia sejak pemerintah Inggris merilis data *gov.uk* pada tahun 2010 dan hadirnya *Memorandum on Transparency and Open Government* pada tahun 2009 oleh pemerintahan Barack Obama (Wahyudi et al., 2021). Di Indonesia dalam mendukung keterbukaan informasi publik pemerintah telah menandatangani deklarasi *Open Government Partnership* (OGP) sebagai salah satu opsi menjadikan pemerintahan global yang terbuka. Penerapan *open government* bertujuan dalam meningkatkan akses teknologi yang mendukung akuntabilitas dan keterbukaan, meningkatkan ketersediaan data pemerintahan, dan mendukung partisipasi masyarakat. Konsep *open government* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menjadi pedoman dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat ditengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan meningkatkan layanan publik.

Konsep pemerintahan terbuka (*open government*) pada dasarnya telah diterapkan di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kota Denpasar. Keterbukaan informasi tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi yang akan memberikan keputusan berdasarkan data dan akuntabilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan publik. Salah satunya melalui website Denpasar Open Data yang mendukung kemudahan penyelenggaraan akses informasi untuk publik mengenai kota Denpasar. Website Denpasar Open Data merupakan salah satu kebijakan tata kelola data pada sektor pemerintah yang terintegrasi dan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Satu Data Daerah. Adanya penerapan konsep *open government* di Kota Denpasar diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Dalam meningkatkan kualitas layanan khususnya dalam penyediaan informasi, Kota Denpasar mengalami berbagai tantangan. Salah satunya integrasi yang kurang dalam penyediaan data dari berbagai instansi yang ada di Kota Denpasar. Selain itu, permasalahan datang dari kegagalan perangkat daerah dalam menyediakan data untuk masyarakat yang bersifat valid. Meskipun tersedia meta data yang merupakan informasi, tetapi tidak terdapat definisi, kapan terbit, dan sumber tidak diketahui sehingga menjadi kendala. Berdasarkan hasil temuan tersebut, permasalahan ini dapat mengurangi nilai transparansi informasi yang disediakan pemerintah. Hal ini disebabkan informasi yang kurang valid sumber data berakibat pada kepercayaan terhadap informasi yang disediakan berkurang. Hal ini menjadi permasalahan ketika masyarakat menghendaki pemerintah yang transparan, namun pada realitasnya pemerintah mengalami tantangan menyediakan data yang dapat dipercaya sumber dan keabsahannya.

Open government menjadi strategi penting dalam reformasi administrasi sebab mendorong negara-negara berbagai belahan dunia untuk melakukan transparansi, partisipasi dan kolaborasi (Afandi et al., 2023). Keterbukaan merupakan karakteristik penting pada pemerintah yang berdemokrasi. Istilah lama *open government* mengacu pada kebebasan pada akses informasi yang tersedia untuk warga negara. Sehingga dapat membuat kekuasaan pemerintah lebih transparan, menekankan pada kontribusi kebebasan informasi hukum yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan

kepercayaan publik, meskipun partisipasi masyarakat dibatasi oleh lingkungan politik. Menurut *Global Integrity*, aspek-aspek penting yang dicakup dalam *open government* seperti transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas menjadi poin sentral dalam konsep *open government*. Adapun dalam penelitian ini mengacu pada model *open government* menurut Lee & Kwak (2011) yang mendefinisikan terdapat empat indikator dalam menilai pemerintahan telah melaksanakan *open government*.

1. Transparansi data (*data transparency*) yaitu keterbukaan proses pemerintahan tercermin dari tersedianya data pemerintahan yang berkualitas.
2. Partisipasi (*open partisipation*) yaitu merujuk pada umpan balik yang diberikan oleh publik, berdialog, melakukan pemilihan dan komunikasi secara interaktif. Dalam hal ini dialog yang terjadi dalam proses partisipasi meliputi usaha diskusi formulasi kebijakan dengan melibatkan berbagai golongan.
3. Kolaborasi (*collaboration*) yaitu kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak, tidak terbatas hanya pada institusi, namun melibatkan sektor privat. Kolaborasi dilakukan pemerintah dengan pihak swasta dilakukan dengan berbagi data (Lee & Kwak, 2011). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan nilai pada pelayanan publik sebab swasta sebagai salah satu pendukung penyedia layanan bagi masyarakat.
4. Interaksi (*engagement*) merupakan tahapan transparansi, partisipasi dan kolaborasi disatukan untuk menghasilkan *open government* yang lebih baik pada suatu institusi (Lee & Kwak, 2011) sehingga berdampak pada perbaikan layanan publik. Interaksi memberikan penekanan bagaimana hubungan pemerintah dengan pemangku kepentingan untuk membuat pemerintah semakin terbuka. Sehingga hal ini akan berdampak pada manfaat luas bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa dalam menerapkan konsep *open government* di Kota Denpasar tersedianya instrumen *monitoring* dan evaluasi sebagai wadah penilaian terhadap keterbukaan pemerintah dinilai kurang sehingga harus dipertimbangkan secara optimal (Agustine et al., 2017). Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan *open government* dalam meningkatkan transparansi informasi pemerintah melalui Denpasar Open Data. Kebaruan penelitian terletak pada penerapan *open government* sebagai teori yang akan menganalisis transparansi informasi pada Denpasar Open Data.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mengkaji Penerapan *Open Government* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Denpasar (Kajian Denpasar Open Data). Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan penerapan *open government* dalam meningkatkan transparansi informasi pemerintah melalui Denpasar Open Data. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana penerapan *open government* yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat dalam memberikan informasi. Penelitian ini menghasilkan data yang bersifat kualitas, tafsiran dan interpretasi dari peneliti yang telah diolah dari hasil pengumpulan data. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti mencoba untuk mengetahui pelaksanaan penerapan *open government* dalam meningkatkan transparansi informasi pemerintah melalui Denpasar Open Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Transparansi (*Open Tranparency*)

Transparansi menjadi bagian dari proses kinerja pemerintah untuk mempublikasikan data secara terbuka kepada publik dengan memanfaatkan media digital (Zellatifanny et al., 2021). Pemanfaatan media berbasis digital dapat meningkatkan kualitas data utamanya dalam ketepatan waktu, akurasi, dan konsistensi pemerintah pada saat melakukan *update* terhadap informasi berbasis data (Lee & Kwak, 2011), sehingga dapat menghasilkan data bernilai tinggi dan berdampak besar terhadap publik. Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan transparansi terhadap data informasi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kota Denpasar, kemudian diturunkan dalam Keputusan Walikota No. 188.45/2176/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Selama memberikan informasi dengan konsep *open data* pemerintah Kota Denpasar memiliki beberapa strategi. Pertama, memanfaatkan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan informasi kepada publik salah satunya melalui Portal SP4N Laporan yang tersambung dengan Super Apps Aplikasi Denpasar Prama Sewaka. Kedua, pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan infrastruktur berupa ruang khusus untuk mengelola data dan informasi yang terintegrasi dengan Denpasar Cyber Monitor Damamaya. Perangkat pengelolaan informasi beroperasi selama 24 jam dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya. Ketiga, mendukung transparansi data yang inovatif pemerintah Kota Denpasar berkeja sama dengan Majelis Agama dan Majelis Desa Adat dalam memanfaatkan media digital untuk melakukan publikasi secara masif melalui media-media yang dikelola (Sa'ban, 2022). Selain itu terdapat juga beberapa saluran permohonan informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan transparansi data informasi kepada publik.

Pertama, tersedianya website PPID yang dapat digunakan oleh publik untuk melakukan permohonan terhadap informasi melalui ppid.denpasarkota.go.id. Kedua, website Safe City menyediakan transparansi terhadap informasi mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Denpasar seperti dibidang sosial, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu pada website Safe City masyarakat dapat mengakses dengan mudah mengenai jumlah data-data kejadian atau permasalahan yang terjadi disetiap kecamatan di Kota Denpasar. Ketiga, meskipun pemerintah di Kota Denpasar berupaya untuk menyajikan transparansi terhadap informasi akan dipungkiri munculnya berita hoax sehingga dibentuk website Tangkal Hoax bertujuan untuk mengklarifikasi informasi sehingga dapat memberikan pencerahan untuk publik. Selain itu dalam mendukung transparansi informasi pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan media *instagram*, *facebook*, *twitter*, *youtube*, dan *tiktok* untuk menyebarkan informasi serta menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi keluhan.



Gambar 1. Platform Penyebarluasan Informasi
(Sumber: Denpasar Kota Channel, 2023)

Pemerintah Kota Denpasar selama menyediakan pelayanan informasi untuk publik dengan spirit *Vasudhaiva Kutumbakam* (semangat menyama braya) juga menyediakan layanan informasi terpadu yaitu *one-stop service chat bot* sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi yang dibutuhkan mengenai Kota Denpasar melalui Denpasar Information Vitual Assistant (DAIVA). Selain itu terdapat juga website Satu Data Denpasar yang merupakan wujud dari tata kelola pemerintah untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses oleh publik, dan dapat dipakai oleh instansi lainnya. Website tersebut telah terintegrasi dengan portal *data.go.id* dan sampai saat ini bulan Mei 2024 jumlah data yang tersedia mengalami peningkatan dengan jumlah 2.209, ditingkat makro terdiri dari 106, dan ditingkat sektoral terdiri dari 2.102 data. Melalui website ini publik dapat mengakses transparansi data dengan mudah berdasarkan kategori dan grup.



Gambar 2. Website Denpasar Satu Data
(Sumber: Website Denpasar Satu Data, 2024)

Ketersediaan platform digital yang digunakan untuk penyebaran informasi secara transparan kepada publik telah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar membuktikan bahwa sistem pemerintah telah menerapkan konsep *open government*. Transparansi data telah mengalami peningkatan dilihat dari website Denpasar Satu Data terdiri dari 2.209. Penerapan transparansi data di Kota Denpasar tidak semata-mata seluruh data dan informasi akan terbuka untuk publik, tetapi terdapat data yang bersifat rahasia dan terbuka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa Ngakan Ketut Rama Sanjaya selaku kepala bidang statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Denpasar menjelaskan bahwa:

Kita ada namanya sebenarnya itu dibagian informasi kalau informasi itu ada yang terbuka ada juga yang dirahasiakan itu sudah ada aturannya keterbukaan informasi publik, tapi informasi publik rahasia itu tetap dipublikasikan listnya mana saja yang tetap bisa. Misalnya NIK yang berapa digit/item itu dikonsumsi publik ada berapa item retina mata sidiik jari diarahasiakan tapi diskominfo tetap memberikan informasi data yang mana rahasia mana tidak itu namanya PPID tapi ketika masyarakat menginginkan data itu PPID tapi sumbernya dari satu data (Selasa, 14 Mei 2024).

Meskipun data memiliki kategori rahasia dan terbuka, tetapi pemenuhan kebutuhan masyarakat selalu berusaha dipenuhi oleh pemerintah. Pemanfaatan media berbasis digital merupakan bagian dari praktik pemerintah dalam menerapkan sistem *e-government* sebagai upaya perbaikan tata kelola birokrasi agar lebih efektif dan efisien ditingkat daerah (Barsei et al., 2023). Namun, dalam mendukung transparansi pemerintah kepada publik utamanya dalam memberikan informasi dan data utamanya pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan laporan tahunan terkait pelayanan keterbukaan informasi publik pada tahun 2022 tidak seluruh OPD, desa, dan lurah dapat memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu terjadi kendala teknis utamanya pada alur informasi website PPID sehingga menyebabkan verifikasi dan pemohon informasi pengguna tidak dapat diproses oleh pengelola.

Pemerintah di Kota Denpasar telah menerapkan transparansi dengan memanfaatkan media digital untuk memberikan informasi dan data kepada publik. Dalam fase ini transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar telah menunjukkan peningkatan terlihat pada jumlah data yang dikelola dan dikeluarkan oleh website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebanyak 2.209 data. Pemerintah Kota Denpasar juga membentuk berbagai saluran komunikasi berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan dapat diakses dengan mudah oleh publik. Beberapa portal resmi yang digunakan meliputi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tangkal Hoax, aplikasi E-Sewaka Dharma, SP4N LAPOR, Safe City, Denpasar Cyber Monitor Damamaya, Denpasar Satu Data, dan media sosial @denpasarkota (*instagram, facebook, twitter, youtube, dan tiktok*). Melalui media portal tersebut memberikan kemudahan untuk pemerintah dalam menyediakan informasi secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk publik berpartisipasi menggunakan data-data dari pemerintah ketika membuat suatu keputusan.

Pemerintah Kota Denpasar juga memberikan keterbukaan terhadap informasi utamanya ketika masyarakat mengajukan pengaduan pada aplikasi E-Sewaka Dharma dan SP4N LAPOR. Melalui aplikasi tersebut segala bentuk informasi terhadap proses pengelolaan status laporan akan diinformasikan secara terbuka oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Transparansi terhadap proses laporan yang diajukan oleh masyarakat dapat memberikan kemudahan untuk publik mengetahui tindak lanjut dari pemerintah. Tidak hanya melalui pemanfaatan media digital/*online*, tetapi pemerintah di Kota Denpasar juga memberikan informasi secara langsung melalui mobil keliling, Radio Publik Kota Denpasar (RKPD), TV pelayanan, videotron, speaker tempat publik, dan kerja sama swasta dalam bentuk penyampaian informasi melalui bioskop serta videotron. Kemudian jumlah kunjungan secara langsung berdasarkan pada data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Denpasar mengalami kenaikan ditahun 2023. Kunjungan masyarakat secara langsung ke Dharma Negara Alaya Kota Denpasar mengalami peningkatan sejumlah 4.330.



Gambar 3. Jumlah Kunjungan Dharma Negara Alaya Kota Denpasar
(Sumber: Website PPID Kota Denpasar, 2023)

Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung *open government* telah mampu menerapkan transparansi melalui ketersediaan informasi secara terbuka untuk publik. Jumlah data yang telah dikumpulkan oleh pemerintah dikelola dalam beberapa website dan aplikasi sehingga memudahkan publik untuk mengaksesnya. Keberhasilan dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik membawa pemerintah Kota Denpasar meraih tiga penghargaan pada penghujung tahun 2023. Penghargaan diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Denpasar, pemerintah Desa Dandin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara, dan Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan. Pencapaian tersebut menjadi dorongan untuk pemerintah di Kota Denpasar agar selalu meningkatkan kemajuan transparansi dalam memberikan informasi dan data kepada publik secara inovatif (Dhimas Samudra et al., 2022).

Selain itu untuk mempertahankan pencapaian tersebut pemerintah di Kota Denpasar secara berkala harus mampu untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dilakukan, sebab berdasarkan laporan tahunan terkait pelayanan keterbukaan informasi publik pada tahun 2022 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Denpasar menyatakan tidak seluruh OPD, desa, dan lurah dapat memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu terjadi kendala teknis utamanya pada alur informasi website PPID sehingga menyebabkan verifikasi dan pemohon informasi pengguna tidak dapat diproses oleh pengelola. Sehingga menjadi catatan untuk pemerintah Kota Denpasar dalam mencari solusi penyelesaian kendala yang dihadapi.

2. Partisipasi (*Open Participation*)

Pelaksanaan peningkatan *open government* utamanya untuk mewujudkan transparansi informasi pada dasarnya membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai umpan balik yang diberikan terhadap perencanaan gagasan sehingga terbentuk kebijakan sesuai dengan kebutuhan (Casalino & Draoli, 2015). Pemerintah menyiapkan berbagai metode dan cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi dapat dilakukan dengan membuka akses terhadap data pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah terbuka dengan gagasan dari masyarakat. Keterlibatan proses partisipasi dalam *open government* juga memberikan wadah untuk terbentuknya komunikasi berbasis kelompok secara langsung dan meningkatkan kebersamaan antara masyarakat dengan instansi pemerintah (Romadhon & Herdiansyah, 2021). Di Kota Denpasar pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 terkait dengan keterbukaan informasi.

Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif sebagai pengguna informasi dan menjadi pengawas terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan pada berbagai media melalui kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan kepala lingkungan bertujuan untuk memberikan edukasi terkait dengan layanan sampai ditingkat bawah. Partisipasi juga ditunjukkan dalam penggunaan aplikasi E-Sewaka Dharma utamanya dalam penyampaian pengaduan oleh masyarakat. Kehadiran aplikasi ini memberikan kesempatan untuk masyarakat secara langsung menyampaikan pengaduan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Pemerintah sebagai pihak pengelola selama menyelesaikan pengaduan memberikan informasi secara terbuka terhadap setiap proses melalui status tindak lanjut. Proses tersebut juga merupakan salah satu bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat secara tidak langsung dalam memberikan informasi dan menyelesaikan pengaduan secara terbuka. Dalam tahapan ini pemerintah dituntut untuk membangun kemampuan menanggapi setiap masukan dan komentar yang diberikan oleh publik secara tepat waktu dan konsisten utamanya melalui pelayanan berbasis digital/*online*.



Gambar 4. Partisipasi Masyarakat dalam Aplikasi E-Sewaka Dharma
(Sumber: Aplikasi E-Sewaka Dharma, 2024)

Pelaksanaan *open government* berlandaskan pada peningkatan partisipasi masyarakat di Kota Denpasar juga dilakukan melalui beberapa media digital seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, *youtube*, dan *tiktok*. Melalui media tersebut masyarakat dengan pemerintah dapat berinteraksi mengenai informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa Ngakan Ketut Rama Sanjaya selaku kepala bidang statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Denpasar menjelaskan bahwa:

Kita sering mengadakan musrenbang melalui votting begitu kita menyajikan infografis data misalnya terkait informasi harga beras mahal premium jadi kita memperlihatkan stok beras terus kita pasang komen melalui votting untuk netizen atau warga sehingga jadi masukan untuk kita. Setiap wisatawan yang datang kita bisa tahu berapa kunjungan ke pantai ada yang nginep di hotel itu kita vote sering liburan ke Denpasar kemana kita juga melibatkan perangkat daerah (Selasa, 14 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan keterbukaan terhadap informasi telah diberikan ruang oleh pemerintah utamanya dalam memberikan pendapat melalui *votting* pada media *instagram*. Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR dengan cara menulis laporan atau aspirasi, menunggu proses verifikasi, pengaduan ditindaklanjuti, masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada instansi, dan tahapan terakhir yaitu laporan selesai. Kedua media layanan aplikasi tersebut menjadi alat bantu monitoring dan verifikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan di Kota Denpasar. Aplikasi tersebut juga merupakan bentuk transparansi dari pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan memberikan kesempatan untuk masyarakat berpartisipasi melalui pemberian laporan tentang permasalahan-permasalahan pembangunan daerah kepada tim verifikasi untuk ditindaklanjuti.

3. Kolaborasi (*Open Collaboration*)

Kolaborasi yang dilakukan dalam model ini dikhususkan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta atau sektor privat. Dalam menciptakan pemerintah yang terbuka (*open government*), pemerintah melalui Diskominfo Kota Denpasar melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Adapun pihak ketiga yang terlibat seperti CV. Rumah Media yang bekerja sama untuk memfasilitasi terbentuknya website Kota Denpasar sebagai sumber informasi bagi masyarakat Kota Denpasar. Kemudian dalam mengembangkan *open government* melalui bank data Kota Denpasar, pemerintah bekerja sama dengan CV. Avatar Solutions bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan PT. Lintas Daya Manunggal dalam mengembangkan sistem informasi Siapel Rutilahu (Sistem Aplikasi Rumah Tidak Layak Huni) sebagai layanan informasi terkait rumah yang tidak layak huni di Kota Denpasar. Terbentuknya kolaborasi dalam mendukung keterbukaan data tentu penting dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa Ngakan Ketut Rama Sanjaya selaku kepala bidang statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar menjelaskan bahwa:

Kalau tentang kolaborasi berarti pada saat kita menyediakan informasi tentu kominfo tidak bisa berdiri sendiri dia harus berkolaborasi dengan perangkat daerah selaku pemberi layanan. Misalnya ada masyarakat yang butuh syarat akta hutang kematian/kelahiran/perkawinan masyarakat sekarang apalagi media digital kominfo itu harus mampu menyediakan satu portal agar layanan dapat diakses minimal dia dapat informasi awal misalnya dia harus ke dukcapil ya mereka setidaknya bawa berkas yang diperlukan karena kolaborasi kominfo itu sebagai corongnya pemerintah jadi supaya masyarakat tidak dioper-oper ke daerah satu daerah dua gitu sehingga mereka benar-bener fix mendapatkan informasi disatu portal apa yang disediakan informasi-informasi (Selasa, 14 Mei 2024).

Pemerintah bekerja sama dengan CV. Penjor Dewata Utama dalam menyediakan informasi jaringan jalan di Kota Denpasar melalui pengembangan Sistem Informasi Jalan Kota (SIJALAK). Pengembangan *open government* melalui kolaborasi juga ditunjukkan melalui kerja sama dilakukan dengan CV. Dutasarana Utama dalam memberikan informasi terkait dengan jaringan irigasi yang berbasis website bernama SIDASI (Sistem Informasi Drainase dan Irigasi) di wilayah Kota Denpasar. Pemerintah juga bekerja sama dalam meningkatkan layanan melalui Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komuditas Strategis (SIGAPURA) berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk memberikan informasi harga pangan di Kota Denpasar.

Kolaborasi atau dalam model Lee & Kwak (2011) pemerintah disebutkan terbuka dalam melakukan kolaborasi (*open collaboration*). Kolaborasi dilakukan dengan publik dan pihak swasta untuk mendapatkan *output* secara spesifik. Sebagai tahapan ketiga dalam *open government*, pemerintah harus membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Masyarakat dan sektor privat memaksimalkan pemanfaatan data yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat aktif dalam berpartisipasi dalam memberikan umpan balik dan masukan. Sehingga keberadaan *open government* dapat meningkatkan layanan dan nilai publik yang tercipta melalui proses kolaborasi. Pemerintah Kota Denpasar melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan swasta yang pada akhirnya bertujuan dalam menciptakan *public value*. Pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui portal Denpasar Open Data informasi yang telah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pertama, secara horizontal pemerintah melakukan kolaborasi dengan dinas, badan, inspektorat dan sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Kedua, secara vertikal terdapat kerja sama dengan pihak swasta seperti BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Integrasi pemerintah yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan *open government* (OECD, 2005). Pada kolaborasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan Open Data, pemerintah hanya bertindak sebagai penyedia informasi tanpa memfasilitasi masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik. Open Data yang dilakukan melalui portal Denpasar Satu Data kurang optimal sebab tidak memfasilitasi publik dalam melakukan interaksi dengan pemerintah disebabkan komunikasi yang hanya dilakukan secara satu arah. Sehingga pada tahapan *open collaboration* memerlukan perbaikan dengan cara meningkatkan interaksi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan (Rahimallah et al., 2022).

4. Interaksi (*Open Engagment*)

Pada tahap interaksi (*open engagment*) pemerintah melakukan perbaikan yang dapat dilihat melalui keberadaan alternatif lain dalam mewujudkan pemerintahan terbuka (*open government*) (Muayana & Kumalasari, 2023). Tahap ini ditujukan dengan meningkatkan dalam memfasilitasi pemangku kepentingan berupa transparansi data, partisipasi dan kolaborasi. Sehingga interaksi menjadi tahap paling menentukan dalam optimalisasi *open government*. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mengembangkan berbagai *platform* layanan bagi masyarakat. Platform layanan yang disediakan tidak hanya menyediakan informasi, namun memberikan runag dalam berpartisipasi dan melakukan kolaborasi dengan layanan yang terintegrasi (Devina Angistya Maharani et al., 2023).

Berbagai *platform* yang memfasilitasi pemangku kepentingan dalam partisipasi, kolaborasi dan interaksi diantaranya telah terdapat sebanyak 71 aplikasi khusus untuk Kota Denpasar yang dioperasikan oleh berbagai dinas, kemudian terdapat 8 aplikasi/sistem informasi umum yang digunakan oleh Kota Denpasar. Selanjutnya terdapat, aplikasi/sistem informasi yang diberikan dari pemerintah pusat untuk Kota Denpasar terdapat 29 aplikasi/sistem informasi.

Tabel 1. Daftar Aplikasi/Sistem Informasi Umum Kota Denpasar

| NO | Nama Aplikasi | OPD | Fungsi |
|----|----------------------------------|-------------|--|
| 1 | PRO Denpasar | Seluruh OPD | Untuk melakukan pengaduan secara online masyarakat Kota Denpasar. |
| 2 | SIDOK (Sistem Informasi Dokumen) | Seluruh OPD | Sistem informasi dokumen untuk seluruh pegawai dan pejabat pemerintah di Kota Denpasar |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|--|
| 3 | Denpasar Plan (<i>e-Planning</i>) | Seluruh OPD | Mengolah, mencatat dan menyimpan data perencanaan OPD |
| 4 | Smart Arsip | Seluruh OPD | Mengolah, mencatat, mendistribusikan dan menyimpan data arsip surat. |
| 5 | e-Kinerja | Seluruh OPD | Mencatat kegiatan harian PNS |
| 6 | Absensi Online | Seluruh OPD | Mengelola kehadiran pegawai |
| 7 | e-Sinjab | Seluruh OPD | Mengelola data analisis jabatan dan analisis beban kerja |
| 8 | Sub Domain | Seluruh OPD | Untuk mempublikasikan kegiatan dan transparansi keuangan OPD |

(Sumber: LKJIP Diskominfos Kota Denpasar, 2022)

Dari seluruh aplikasi dan sistem informasi yang disediakan pemerintah Kota Denpasar, beberapa aplikasi dapat memfasilitasi partisipasi dan kolaborasi. Lebih lanjut, penulis menemukan beberapa data yang memfasilitasi layanan akses informasi sebagai perbaikan dari tahap interaksi dalam *open government*, sebagai berikut.

Tabel 2. Aplikasi yang memfasilitasi masyarakat dalam interaksi dan kolaborasi

| NO | Nama Sistem Informasi/Aplikasi | OPD Pemilik | Fungsi |
|----|---|------------------|---|
| 1 | PRO Denpasar | DISKOMINFOS | Berfungsi memfasilitasi layanan pengaduan masyarakat di Kota Denpasar |
| 2 | Mobile e-Sewaka Dharma | DISKOMINFOS | Aplikasi layanan dalam melakukan kegiatan administrasi kependudukan. |
| 3 | Safe City | DISKOMINFOS | Aplikasi layanan tentang permasalahan yang terjadi, seperti kerawanan bencana, tindakan kriminal dan kecelakaan di Kota Denpasar. |
| 4 | Wibsite Kota Denpasar | DISKOMINFOS | Layanan untuk mendapatkan informasi terkait Kota Denpasar. |
| 5 | Website Diaspora | DISKOMIFOS | Sebagai layanan antar muka bagi masyarakat disabilitas untuk mendapatkan informasi tentang Kota Denpasar. |
| 6 | Rajakol (Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Online) | DPUPR | Layanan masyarakat untuk membuat izin usaha. |
| 7 | Ramasita | Sekretariat DPRD | Aplikasi Pengaduan Masyarakat |

(Sumber: LKJIP Diskominfos Kota Denpasar, 2022)

Pada tahap ini memperlihatkan usaha keterbukaan lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perbaikan dalam meningkatkan transparansi informasi. Lembaga-lembaga melakukan kolaborasi pada tingkat keterlibatan publik lebih lanjut (Lee & Kwak, 2011). Partisipasi dan kolaborasi yang dinilai kurang diperbaiki pada *engagement* untuk memaksimalkan pemanfaatan data. Interaksi secara masif dalam memperbaiki transparansi ditandai dengan keberadaan berbagai metode, layanan dan alat untuk meningkatkan keterlibatan publik secara terintegrasi.

Pemerintah Kota Denpasar melakukan digitalisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berbagai jenis layanan telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, sehingga hal ini memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi (Chairunnisa et al., 2023). Hal ini telah berdampak pada demokratisasi dan mendukung reformasi pada sektor publik. Adapun dampak dari interaksi pada tingkat lanjut ini sebagai berikut:

| a) Partisipasi secara politik | b) Kolaborasi yang berbasis partisipasi masyarakat | c) Dampak bagi individu atau swasta |
|---|--|--|
| 1. Denpasar open data telah memfasilitasi pihak eksternal khususnya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahannya. | 1. Kolaborasi yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar yaitu dengan melibatkan masyarakat dan swasta sehingga hal ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat maupun swasta dalam mencapai layanan yang lebih optimal. Denpasar Open Data yang bekerja bersama beberapa pihak swasta dapat memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi layanan. | 1. Data tidak hanya diperuntukan dalam sebagai pengawasan, tetapi menjadi sumber terpercaya bagi individu sebab data yang disajikan merupakan fakta yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 2. Bagi pihak swasta yang berkolaborasi dengan pemerintah kota Denpasar, mendapatkan manfaat sebagai informasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Kehadiran swasta memberikan dampak dalam menghasilkan layanan publik yang lebih baik. |
| 2. Memfasilitasi masyarakat Kota Denpasar dalam mendapatkan informasi penting mengenai permasalahan yang dapat diakses melalui portal Denpasar Open Data. | | |

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis temuan di lapangan mengenai penerapan Open Government dalam meningkatkan transparansi informasi pemerintah (Kajian Denpasar Open Data), dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan transparansi sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala pada situs web utama yang belum sepenuhnya mewadahi partisipasi publik. Analisis ini didasarkan pada teori Open Government menurut Lee & Kwak (2011) dengan empat indikator yaitu transparansi data, partisipasi, kolaborasi, dan interaksi. Pertama, dalam hal transparansi data, pemerintah Kota Denpasar telah menggunakan berbagai media digital seperti PPID, Tangkal Hoax, E-Sewaka Dharma, SP4N LAPOR, dan media sosial untuk memberikan informasi secara terbuka kepada publik. Kedua, pada indikator partisipasi, masyarakat dapat terlibat dalam memberi umpan balik terhadap kebijakan melalui aplikasi seperti SP4N LAPOR dan E-Sewaka Dharma, yang memfasilitasi interaksi

langsung dengan pemerintah. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta telah berjalan, meskipun terdapat kendala dalam partisipasi publik pada portal Denpasar Satu Data yang cenderung bersifat satu arah. Terakhir, dalam indikator interaksi, teknologi telah dimanfaatkan untuk menyediakan informasi yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pihak swasta dapat memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan kesimpulan di atas dan melihat permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai Penerapan *Open Government* dalam Meningkatkan Transparansi Informasi Pemerintah (Kajian Denpasar Open Data), adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti sehingga pelaksanaan *open government* di Kota Denpasar dapat berjalan dengan optimal, sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat memperbaiki beberapa portal salah satunya portal Denpasar Open Data yang hanya menyediakan komunikasi satu arah sehingga ketika mengakses terkadang kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Perbaikan dapat dilakukan dengan menyediakan ruang atau fitur untuk masyarakat melakukan pengajuan data dan memberikan timbal balik (*feedback*) terhadap layanan yang telah disediakan oleh pemerintah secara terbuka.
2. Pemerintah Kota Denpasar secara berkala harus melakukan sosialisasi atau musrenbang dengan tujuan menarik minat masyarakat dalam memanfaatkan keterbukaan layanan publik terhadap informasi dan data yang telah disediakan dengan baik sehingga dapat menciptakan *public value*.
3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala kepada OPD, desa, dan lurah sebab tidak semua sumber daya pemerintah memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu melakukan *maintenance* terhadap portal digital pemerintah karena sering terjadi kendala teknis utamanya pada alur informasi website PPID sehingga menyebabkan verifikasi dan pemohon informasi pengguna tidak dapat diproses oleh pengelola.

Daftar Pustaka

- Afandi, S. A., Erdayani, R., & Afandi, M. (2023). Open Government: A Bibliographic Study of The Semarang and Gwangju Experiences. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2), 217–234.
- Agustine, T. E., Mohammad, D., & Prawira, Y. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintahan Terbuka Dalam Pelayanan Publik Di Kota Denpasar Analyzing Open Government Policies on Public Service in Denpasar City. *Jurnal Wacana Kinerja*, 20(2), 71–88.
- Barsei, A. N., Nugroho, S. A., Ghassani, G. A., & Trianita, L. N. (2023). Inovasi Digital pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendorong Open Government. *Matra Pembaruan*, 7(2), 99–110.
- Casalino, N., & Draoli, M. (2015). *Organizing and Promoting Value Services in Public Sector by a New E- Organizing and Promoting Value Services in Public Sector by a New E-government Approach. March.*
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., Berthanila, R., Indonesia, B., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 11(02), 31–45.
- Kusumaningrum, A., Bachtiar, R., & Listiningrum, P. (2019). Improving Indonesia'S Commitment To Open Government Partnership Through Online Petitions. *Indonesian Journal of International Law*, 16(2), 273–298.

- Lee, G., & Kwak, Y. H. (2011). An Open Government Implementation Model: Moving to Increased Public Engagement. *IBM Center for The Business of Government*, 1–35.
- Mandasari, N. (2023). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(1), 46–62.
- Maharani, D. A., Usman, O., & Rachmadania, R. F. (2023). Analisis Pelayanan Publik Melalui Website PPID Pada Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 80–90.
- Muayana, S. K., & Kumalasari, A. (2023). Open Government Sistem Informasi Di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 7(1), 45-52.
- Nugroho, R. A., Dihadiska, A. V., Prakoso, S. G., & Putra, F. A. (2023). Open Government Implementation During the Pandemic: Lesson – Learned From Surakarta City Government. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(2), 252–270.
- Oecd. (2005). *Modernizing Government: The Way Forward*. Paris.
- Rahimallah, M. T. A., Sartika, I., Sumampow, A. S., & Putri, L. D. M. (2022). Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan: Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 191–204.
- Romadhon, T. A., & Herdiansyah, M. I. (2021). Pengembangan Konsep Open Government Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Kota Palembang (Studi Kasus: Kota Palembang). *Gema Teknologi*, 21(2), 86–90.
- Sa’ban, L. M. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Kota Baubau. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 48–57.
- Samudra, D. F. D., Salahudin, S., & Taufikurrahman, I. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Portal Informasi Pemkab Nganjuk (Ping). *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 73–78.
- Soegiono, A. N. (2017). Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 1-36.
- Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., Morando, F. (2016). Open Data Quality Measurement Framework: Definition And Application To Open Government Data. *Elsevier: Government Information Quarterly*, 33(325–337).
- Wahyudi, W., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2021). Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 253–266.
- Yudan, F. F., & Virgy, M. A. (2021). Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Transformative*, 7(1), 128–153.
- Zellatifanny, C. M., Rumata, V. M., & Sakinah, A. M. (2021). The Impact Of Public Information Awareness And Service Towards Public Engagement. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 439–452.